

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA METRO**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro ini dapat diselesaikan.

Rangkaian Sistem Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) secara lengkap, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. sekalipun belum terselenggara secara lengkap sistem kinerja ini berjalan, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro telah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Laporan ini disampaikan memuat rencana kerja dan pengukuran kinerja tahun 2024, Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) disusun guna menerapkan pola/ sistem pemerintahan yang baik yang bermuara pada Laporan Kinerja ini sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Pemerintah ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2023, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidak berhasilan.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Inspektorat dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajarannya. Dimasa mendatang Inspektorat akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip.

transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama dapat dicapai dan pada akhirnya dapat mewujudkan *good governance*.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat

kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO,

ELMANANI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700115 199003 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	3
BAB I Pendahuluan	4
A Latar Belakang.....	4
B Dasar Hukum.....	7
C Maksud dan Tujuan.....	7
D Ruang Lingkup	8
E Gambaran Umum.....	8
F Struktur Organisasi.....	12
G Permasalahan Strategis.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A Perencanaan Strategis	19
B Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A Pengukuran Capaian Kinerja	27
B Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	60
A Kesimpulan	60
B Langkah dimasa mendatang.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Metro terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 yang mempunyai luas 68,74 km² (6.874 Ha.) terdiri dari 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan, yaitu Kecamatan Metro Pusat terdiri dari 5 Kelurahan, Kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Metro Timur terdiri dari 5 Kelurahan, Kecamatan Metro Barat terdiri dari 4 Kelurahan dan Kecamatan Metro Selatan terdiri dari 4 Kelurahan.

Dalam menyusun rencana strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sangat dipengaruhi oleh Visi Kota Metro periode 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”**

Untuk mencapai visi Kota Metro seperti tersebut di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dalam pelaksanaan tugasnya harus sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021 – 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Kota Metro, sebagai unsur pelaksana teknis. Dikarenakan hal tersebut maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro akan memfokuskan kepada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, serta menurunnya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN, Mahasiswa dan Pelajar.

Dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur

dalam mengemban dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparatur serta pemanfaatannya disadari akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Dengan tersedianya aparatur yang memadai dan berkompetensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro akan berupaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam Bidang Politik Pemerintahan Dalam Negeri.

Keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat di lihat pada saat ini yaitu agenda 5 (lima) besar diantaranya :

1. Percepatan reformasi birokrasi;
2. Island of Integrity;
3. Manajemen berbasis kinerja;
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu peran masing masing pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada.

Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus diiringi dengan penerapan prinsip *good governance*. Dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) merupakan salah satu unit organisasi Pemerintah Daerah Kota Metro yang diharapkan mampu untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah di Kota Metro melalui penyelenggaraan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu fungsi management yang harus dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk mencapai hal tersebut perlu ditetapkan berbagai kegiatan yang dikemas dalam program kerja.

Berakhirnya Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2024 yang memuat informasi tentang pelaksanaan tugas rutin dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024, baik mengenai hasil-hasil yang telah dicapai maupun berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Metro.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini telah mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Permasalahan utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro selama Tahun 2024 adalah :

1. Jumlah Ormas yang selalu bertambah
2. Adanya konflik didalam intern Ormas (munculnya dualisme)
3. Kasus penyalahgunaan narkoba banyak terjadi dikalangan remaja, khususnya pelajar dan mahasiswa.
4. Tidak tertibnya ormas dalam penyampaian surat pertanggungjawaban.

5. Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Siswa di Sekolah-sekolah.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2024, terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sedangkan maksud disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran secara kualitatif dan kuantitatif mengenai pelaksanaan dan pencapaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2024

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah disesuaikan dengan pelaksanaan dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

E. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mempunyai tugas pokok: melakukan urusan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kota Metro.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kota Metro;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik Kota Metro; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota.

1. Sekretariat

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

a. Sub Bagian Program Anggaran Dan Keuangan

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan ,

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kegiatan Administrasi Kepegawaian.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan .

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama.

a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara , wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan,

b. Sub Bidang ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sub Bidang ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi,pembinaan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing.

a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri.

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerja sama intelejen.

b. Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik.

F. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro secara hierarki terdiri dari :

- Kepala Badan (Eselon II)
- Sekretaris (Eselon III)
- Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama (Eselon III)
- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Eselon III)
- Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Eselon III)
- Analis SDMA Ahli Muda (Eselon IV/a)
- Perencana Ahli Muda (Eselon IV/a)
- Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Eselon IV/a)
- Analis Kebijakan Ahli Muda Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (Eselon IV/a)
- Analis Kebijakan Ahli Muda Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri (Eselon IV/a)
- Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Eselon IV/a)
- Analis Kebijakan Ahli Muda Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen (Eselon IV/a)
- Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik (Eselon IV/a)
- Jabatan-jabatan fungsional lainnya

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

1. Kepegawaian

SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada Tahun 2024 berjumlah 58 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 7 orang, Jabatan Fungsional 10 orang, Jabatan Pelaksana 14 dan Tenaga Honorer 27 orang dengan rincian sbb :

a. SDM berdasarkan Jabatan

➤ Pegawai eselon II	:	1	orang
➤ Pegawai eselon III	:	4	orang
➤ Pegawai Eselon IV	:	2	orang
➤ Pegawai Fungsional	:	11	orang
➤ Pegawai Pelaksana	:	14	orang
➤ Pegawai PPPK	:	2	orang

b. SDM berdasarkan Pangkat/Golongan

➤ Golongan IV	:	6	orang
➤ Golongan III	:	17	orang
➤ Golongan II	:	6	orang
➤ Golongan IV (PPPK)	:	2	orang
➤ Honorer	:	27	orang

c. SDM berdasarkan tingkat pendidikan :

ASN

➤ Pendidikan S-3	:	-	orang
➤ Pendidikan S-2	:	7	orang
➤ Pendidikan S-1	:	16	orang
➤ Pendidikan D-3	:	2	orang
➤ Pendidikan SLTA	:	6	orang

Honorer

➤ Pendidikan S-1	:	12	orang
➤ Pendidikan D-3	:	2	orang
➤ Pendidikan SLTA	:	12	orang
➤ Pendidikan SLTP	:	1	orang

d. SDM yang telah mengikuti Diklat (Struktural dan Fungsional)

- ADUMLA : 1 orang
 ➤ ADUM/DIKLATPIM IV : 5 orang

Jumlah Pegawai ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dapat dilihat dari table sebagaimana berikut ini :

No	Bagian / Bidang	Jumlah
1.	Kepala Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bagian Umum dan Kepegawaian	15
4.	Bagian Program Anggaran dan Keuangan	9
5.	Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	12
6.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	11
7.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	9
	J u m l a h	58

2. Sarana dan Prasarana (Barang Inventaris)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro didukung sarana dan prasarana (terlampir)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KOTA METRO BERPENDIDIKAN, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA

MISI 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing ditingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan

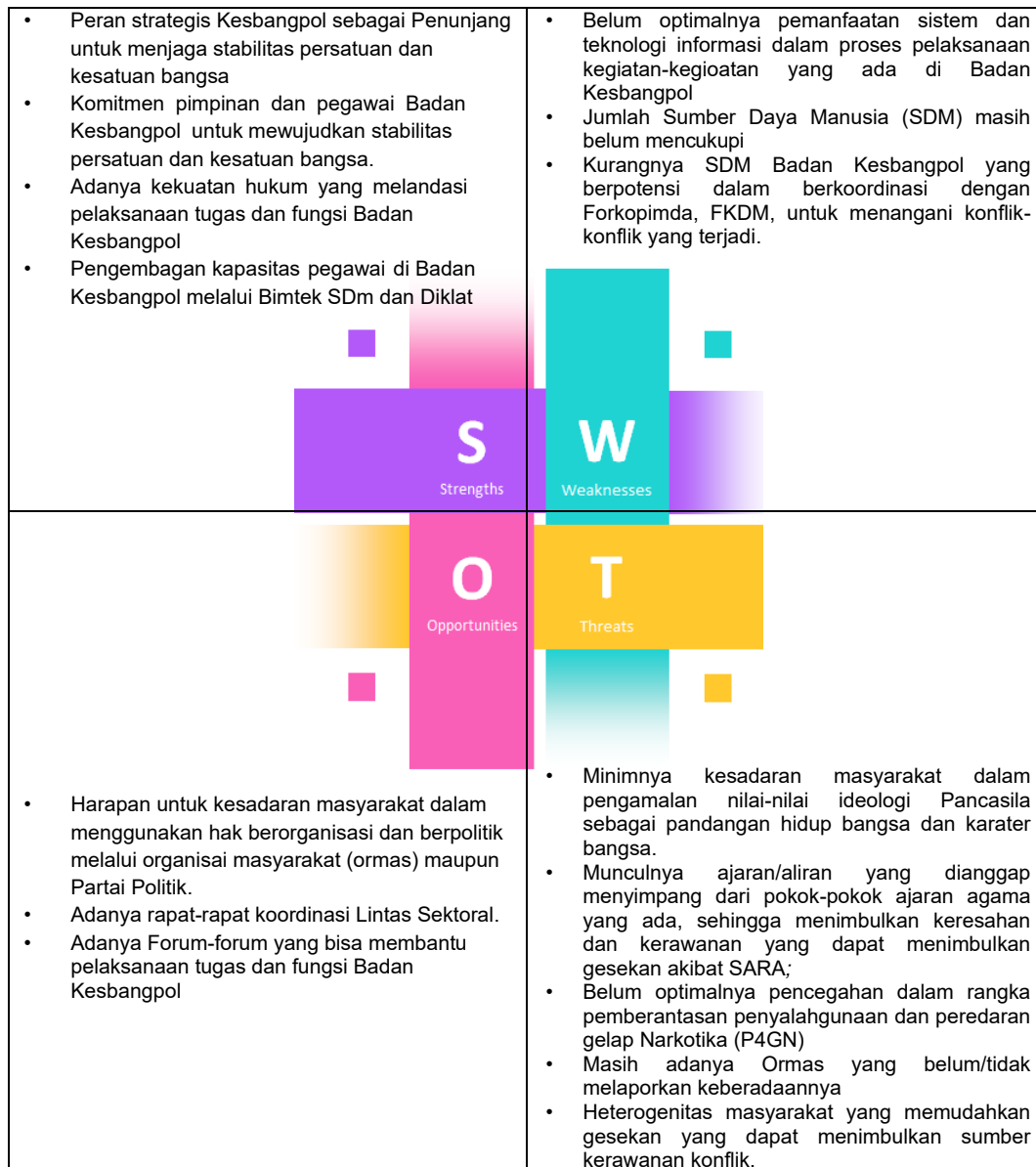
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas Politik serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Mewujudkan Stabilitas Politik serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama	Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama
		2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang pemahaman bahaya narkoba	Memberikan sosialisasi tentang pemahaman bahaya narkoba
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terhormat dan bermartabat			
		1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat	Memberikan sosialisasi tentang nilai nilai luhur bangsa

		2. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
		3. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.	Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
		4. Meningkatkan cipta kondisi ATGH diwilayah Kota Metro	Membentuk tim koordinasi intelijen dalam rangka pemetaan wilayah keamanan, ketertiban masyarakat
		5. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam penanganan	Koordinasi dan Kerjasama yang efektif dengan forum-forum {FKUB, FKDM , FPK }, Instansi

		terorisme dan radikalisme.	terkait dalam penanganan terorisme dan radikalisme di kota metro .
		6. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan orang asing , Lembaga Asing, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penanganan Konflik Sosial,	Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Tim Kewaspadaan Masyarakat, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

G. Permasalahan Strategis

Dalam mengoptimalkan aspek strategisnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro masih memiliki permasalahan-permasalahan strategis yang harus di hadapi. Permasalahan strategis ini dianalisa dengan mengidentifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman) atau lebih di kenal dengan metode analisa SWOT. Berikut ini analisa SWOT :



Gambar 1.2
Analisis SWOT Badan Kesbangpol

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat di gunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika didukung sistem pengumpulan data yang handal dan pengungkapan melalui informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan. Oleh karena itu perlu di susun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021 - 2026, Renstra Badan Kesbangpol Kota Metro Tahun 2021 – 2026 telah menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis serta indikator kinerja utama untuk mendukung tercapainya visi Kota Metro "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera Dan Berbudaya" dan misi ke 5 Kota Metro "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Terhormat, Dan Bermartabat".

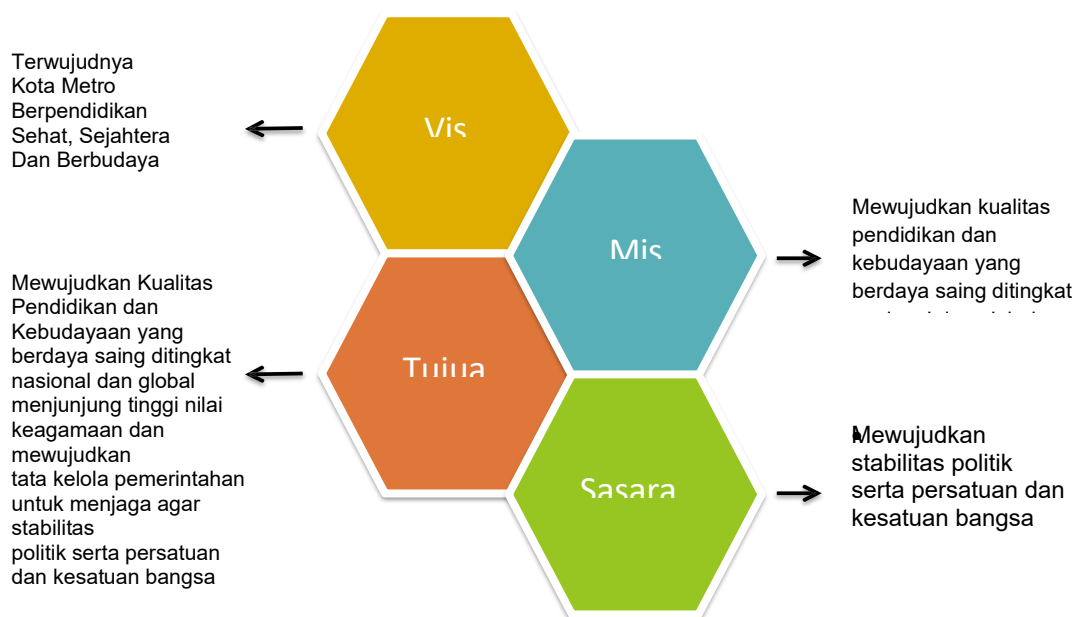
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis Badan Kesbangpol Kota Metro "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien". Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Pemerintah Kota Metro untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan strategisnya, tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki sasaran strategis yang terukur. Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang akan dirumuskan setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan agar dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka ditetapkan sasaran strategis Badan Kesbangpol yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b. Meningkatnya pengawasan dan pencegahan korupsi



B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai penyelenggara Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro harus mampu merenspon terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi terselenggaranya *Good Governance*.

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro telah merumuskan Perjanjian Kinerja :

Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan Stabilitas Politik serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Peningkatan Kerukunan Beragama	90%
		Jumlah Peserta Sosialisasi yang Paham Terhadap Bahaya Narkoba	100 orang
		Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
		Persentase Ormas yang Melaksanakan Fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	100%
		Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%

2	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%
3	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
4	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik, kelompok masyarakat ormas, LSM	100%
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Agama	Persentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	100%
7	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan meningkatnya kualitas dan fasilitasi penanganan konflik nasional	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%

1. Indikator : Persentase Kerukunan Umat Beragama

Sasaran : Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

2. Indikator : Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba

Sasaran : Meningkatkan peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba

Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

3. Indikator : Persentase Partai Politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan

Sasaran : Meningkatkan jumlah Partai Politik yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.

4. Indikator : Persentase Ormas yang melaksanakan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Sasaran : Meningkatkan Ormas yang melaksanakan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Or,mas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Indikator : Persentase Penanganan Konflik Sosial
Sasaran : Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial
Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

6. Indikator : Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7. Indikator : Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran : Meningkatkan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

8. Indikator : Persentase Peserta Pendidikan Poilitik Bagi partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas dan LSM

Sasaran : Meningkatkan Pendidikan Poilitik Bagi partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas dan LSM

Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.

9. Indikator : Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

Sasaran : Meningkatkan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Or,mas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

10. Indikator : Persentase Kerukunan Umat Beragama

Sasaran : Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama

Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

11. Indikator : Persentase Penanganan Konflik Sosial

Sasaran : Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro.

Pengukuran Kinerja mencakup : kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kerukunan beragama

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indukator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
Persentase kerukunan umat beragama	90%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase kerukunan umat beragama melebihi target yang ditentukan

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang melibatkan Agama lain}}{\text{jumlah semua Kegiatan Agama}} \times 100 \%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
3/3 X 100 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Persentase kerukunan umat beragama	90%	100%	100%	80 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	70%	127%	127%

Pada tabel capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator persentase kerukunan umat beragama pada tahun 2024 masih tetap sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu melampaui dari target yang ditentukan .

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Persentase kerukunan umat beragama	90 %	90 %	100%	100%

Tahun 2024 indikator Kerukunan Umat Beragama mencapai Target. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sama dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga keagamaan yang terbentuk yaitu forum kerukunan antar umat beragama (FKUB). Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam

pencapaiannya dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan persentase lembaga keagamaan yang berperan aktif yaitu dengan ,melakukan rapat-rapat koordinasi dengan FKUB, yang terdiri dari tokoh-tokoh atau pemimpin dari 5 Agama yang ada di Kota Metro serta dukungan dana hibah daerah dari APBD Kota Metro.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia sudah sangat efisiensi karena sumber daya manusia dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah sesuai pada aturan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan Sumber Daya Manusia melalui Sk Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan disesuaikan jumlahnya sehingga untuk penggunaan Sumber Daya Manusia dari jumlah yang ada di RKA 27 orang dan Realisasi 15 orang sehingga efisiensi 12 orang.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 37.491.400,- terealisasi Rp. 36.124.950,-, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,6%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Kinerja Persentase Kerukunan Umat Beragama dicapai melalui program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah.

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase kerukunan umat beragama mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target 90 % sehingga dicapai 100 %. Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian sasaran meningkatkan kerukunan umat beragama dengan jumlah indikator kinerja 1 (satu) yang menunjukan predikat berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 100 %.

2. Jumlah Peserta Sosialisasi yang Paham Terhadap Bahaya Narkoba

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	100 peserta	100 peserta	100 %

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba mencapai target yaitu sejumlah 100 peserta dari target 100 peserta sehingga dicapai 100 %.

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba}}{\text{jumlah seluruh peserta nsosialisasi}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
100/100 X 100 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	100 peserta	100 peserta	100%	100 peserta	100 peserta	100 %	100 peserta	95 peserta	95 %	225 peserta	158 peserta	70 %

Capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Badan kesatuan bangsa dan Politik dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024		2024	2024
Meningkatkan Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba di tahun 2024 sama dengan target pada RPJMD.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rutin melaksanakan sosialisasi dengan Mahasiswa dan Masyarakat, serta rutin Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Metro.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efisien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya sehingga untuk penggunaan SDM dari jumlah yang ada di RKA 15 orang realisasi 10 orang sehingga efisiensi 5 orang.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator tersebut dari anggaran Rp. 94.566.200,- realisasi Rp. 84.676.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,5%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba dicapai melalui program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah. Dengan adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini maka Indikator Kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang

ditentukan dan sebaliknya jika Indikator Kinerja ini tidak terdapat dalam Proram, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini maka tidak akan berjalan dengan baik dan kinerja tidak tercapai sesuai target. Dan dilaksanakan melalui Kegiatan Timdu P4GN.

3. Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Fungsinya Sesuai Peraturan Perundangan-undangan.	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Fungsinya Sesuai Peraturan Perundang-undangan telah Mencapai Target yaitu Senilai 100 % dari target 100 % sehingga dicapai 100 %.

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundangan-undangan}}{\text{jumlah partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik}} \times 100 \%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
7/7 X 100 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Jumlah partai politik yang	Persentase partai politik yang melaksana	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	50%	50%	100%

melaksana kan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan	kan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa indikator Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan selalu mencapai target jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Jumlah partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Fungsinya Sesuai Peraturan Perundang-undangan di tahun 2024 tercapai. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sama dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Pencapaian di atas telah Mencapai Target , namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya dikarenakan Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Fungsinya Sesuai Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Melaksanakan Pembinaan tentang Bimbingan Teknis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.
3. Melaksanakan pembinaan peningkatan peran partai politik melalui pendidikan Politik memasuki suksesnya pemilu tahun 2024.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efisien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 13.774.269.418,- realisasi Rp. 13.770.007.968,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0 %

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan Ini

dicapai melalui Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Pada Sub.Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Terdiri dari Sub Kegiatan Forum Koordinasi Dengan Pengurus Partai Politik dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Dan dilaksanakan melalui Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

4. Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	100 %	94%	94 %

Berdasarkan Data pada tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri tidak tercapai dari target yang ditetapkan , yaitu sebesar 94 % dari target sebesar 100 % sehingga hanya tercapai 94 %.

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri}}{\text{jumlah Ormas yang menerima hibah}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
34/36 X 100 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	100%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	90%	90 %	35%	18%	51%

Pada tabel capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator Persentase Ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri pada tahun 2024 dan 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2022 pada tahun 2024 dan 2023 tercapai 94% dari target 100% realisasi 94% dan pada tahun 2022 tercapai 90% dari target 100% sedangkan realisasi 90% untuk tahun 2021 tercapai 51% dari target 35% sedangkan realisasi 18%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa politik dalam negeri	Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	100%	100%	94%	94%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri di tahun 2024 tidak tercapai dikarenakan masih ada beberapa ormas yang belum terdaftar di Pemerintahan Kota Metro.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Meningkatkan Persentase Ormas Yang Melaksanakan Fungsi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Dengan Melakukan Pendataan Ulang Terhadap Kondisi Riil Ormas di Kota Metro.

Dari data yang ada bahwa data ormas penerima hibah ada 36 ormas, sedangkan yang hanya mencairkan ada 34 ormas untuk yang 2 ormas tidak mencairkan dana hibahnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efisien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 1.698.526.900,- realisasi Rp. 1.645.989.350,-, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,1%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ini di capai melalui Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanakan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pada Sub.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas ,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Media Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang terdiri dari Sub,Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Ormas dan Hibah Ormas.

5. Persentase penanganan konflik sosial

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan konflik sosial	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Data pada tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial mencapai target yang ditetapkan

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik sosial yang terjadi}}{\text{jumlah Konflik yang ada}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
1/1 X 100 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Penanganan Konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas pada tahun ini dan tahun lalu realisasi capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial sama-sama mencapai 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Penanganan Konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial tahun 2024 tercapai 100% dari target 100%, realisasi 100% dan perbandingan realisasi kinerja telah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan strategis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dan selalu melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda, Anggota Kominda dan FKDM dalam menangani konflik sosial di Kota Metro. Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase penanganan konflik sosial dalam katagori berhasil yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% bdari target 100%.hal ini karena :

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda bersama stakeholder terkait dalam membahas permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi
2. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda.
3. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Penurunan kinerja disebabkan karena :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efesiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efesien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan

SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.

- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 75.284.400,- realisasi Rp. 72.937.050,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,1%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Persentase penanganan konflik sosial ini di capai melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dan Penanganan Konflik Sosial.

Pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

6. Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tabel) dan narasi/analisis
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel) dan narasi/analisis
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (Tabel) dan narasi/analisis

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
(Tabel) dan narasi/analisis
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
(Tabel) dan narasi/analisis
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
(Tabel) dan narasi/analisis
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
(Tabel) dan narasi/analisis

7. Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Data pada tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai telah mencapai target yang ditetapkan , yaitu dengan upaya-upaya yang telah dilakukan.

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Universitas yang diundang}}{\text{Universitas yang hadir}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :

5/5 X 100 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38%	38%	100%	80%	80%

Pada tahun 2024 jika dibanding dengan 3 tahun terakhir mengalami progres yang baik, hal ini perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di tahun 2024 tercapai 100% lebih baiknya jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya yang

hanya 80%. Dan perbandingan indikator kinerja telah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan startegis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Pencapaian diatas mencapai target yang ditetapkan dikarenakan Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro untuk meningkatkan Persentase universitas yang diberikan pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah

1. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro.
2. Berusaha untuk mendapatkan tambahan anggaran agar bisa untuk mengundang seluruh Sekolah yang ada di Kota metro.
3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak Polres Kota Metro dan Kodim 0411/KM untuk menangkal paham-paham radikal yang akan merusak mental mahasiswa dan masyarakat umum.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efesien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 32.202.800,- realisasi Rp. 28.249.920,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,3%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Persentase sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Karakter Kebangsaan ini di capai melalui Program Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

8. Persentase peserta Pendidikan Politik bagi Partai Politik kelompok Masyarakat, Ormas dan LSM

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM	100 %	100 %	100 %

Pada tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target sebesar 100 % sehingga tercapai 100 %.

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah peserta yang hadir}}{\text{jumlah peserta yang diundang}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
80/80 X 100 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM	100%	100%	100%	100%	105%	105%	100%	95%	95%	100%	110%	110%

Indikator kinerja Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM pada tahun 2024 telah mencapai target mengikuti tahun sebelumnya (n-1) berkat adanya kinerja dan upaya yang lebih maksimal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja/RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM	100%	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM di tahun 2024 tidak tercapai dan target 100%

realisasi 105% dan perbandingan indikator kerja sampai dengan tahun 2024 telah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan strategis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Pencapaian diatas tidak mencapai target, karena masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan ini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM adalah Melaksanakan pembinaan peningkatan peran dan pendidikan partai politik, kelompok masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan serta LSM.

Penurunan kinerja disebabkan karena :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efisien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 13.774.269.418,-

realisasi Rp. 13.770.007.968,- dengan persentase sebesar 100% sehingga tidak terdapat efesiensi anggaran.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari indikator Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik kelompok masyarakat, ormas dan LSM Ini dicapai melalui Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

9. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Data pada tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan dengan adanya upaya yang dilakukan badan Kesbangpol dengan pihak-

pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas-ormas yang telah terdaftar di Pemerintah Kota Metro.

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ormas yang diterbitkan SKKO}}{\text{jumlah ormas yang mengajukan SKKO}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
35/35 X 100 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	94%	94%

Pada tabel diatas pada tahun ini dan tahun lalu realisasi capaian indikator kinerja Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian realisasi tahun 2021 94% pada tahun 2022 tercapai 98% dan pada tahun 2023 tercapai 100% sedangkan pada tahun 2024 juga mencapai 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja /RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif di tahun 2024 tercapai 100% dari target 100% realisasi 100% dan perbandingan indikator kinerja antara target dan realisasi sampai dengan tahun ini sama dengan target dan realisasi yang ada di dokumen perencanaan strategis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pembinaan yang intensif dan memfasilitasi program dan kebijakan terhadap organisasi masyarakat yang terdaftar.
- syarat-syarat organisasi kemasyarakatan telah terpenuhi seperti telah ada SKKO, alamat sekretariat Organisasinya jelas serta tidak ada permasalahan dalam intern kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan.

Penurunan kinerja disebabkan karena :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini
- Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efisien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator tersebut dari anggaran Rp. 19.072.100,- realisasi Rp. 15.224.850,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 21,2%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif ini dicapai melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.

10. Persentase peningkatan kerukunan beragama**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
Persentase kerukunan umat beragama	90%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase kerukunan umat beragama melebihi target yang ditentukan

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang melibatkan Agama lain}}{\text{jumlah semua Kegiatan Agama}} \times 100 \%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :
 $3/3 \times 100 \%$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Persentase kerukunan umat beragama	90%	100%	100%	80 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	70%	127%	127%

Pada tabel capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator persentase kerukunan umat beragama pada tahun 2024 masih tetap sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu melampaui dari target yang ditentukan .

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Persentase kerukunan umat beragama	90 %	90 %	100%	100%

Tahun 2024 indikator Kerukunan Umat Beragama mencapai Target. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sama dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga keagamaan yang terbentuk yaitu forum kerukunan antar umat beragama (FKUB). Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan persentase lembaga keagamaan yang berperan aktif yaitu dengan ,melakukan rapat-rapat koordinasi dengan FKUB, yang terdiri dari tokoh-tokoh atau pemimpin dari 5 Agama yang ada di Kota Metro serta dukungan dana hibah daerah dari APBD Kota Metro.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia sudah sangat efisiensi karena sumber daya manusia dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah sesuai pada aturan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan Sumber Daya Manusia melalui Sk Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan disesuaikan jumlahnya sehingga untuk penggunaan Sumber Daya Manusia dari jumlah yang ada di RKA 27 orang dan Realisasi 15 orang sehingga efisiensi 12 orang.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 37.491.400,- terealisasi Rp. 36.124.950,-, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,6%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan dari Indikator Kinerja Persentase Kerukunan Umat Beragama dicapai melalui program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah.

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase kerukunan umat beragama mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target 90 % sehingga dicapai 100 %. Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian sasaran meningkatkan kerukunan umat beragama dengan jumlah indikator kinerja 1 (satu) yang menunjukan predikat berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 100 %

11. Persentase penanganan konflik sosial

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan konflik sosial	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Data pada tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial mencapai target yang ditetapkan

- Adapun pengukurannya didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik sosial yang terjadi}}{\text{jumlah Konflik yang ada}} \times 100\%$$

- Sedangkan Data Perhitungan Realisasi Sebagai berikut :

$1/1 \times 100 \%$.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Penanganan Konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas pada tahun ini dan tahun lalu realisasi capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial sama-sama mencapai 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja / RPJMD	Capaian Kinerja
		2024	2024	2024	2024
Meningkatkan Penanganan Konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial tahun 2024 tercapai 100% dari target 100%, realisasi 100% dan perbandingan realisasi kinerja telah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan strategis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dan selalu melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda,

Anggota Kominda dan FKDM dalam menangani konflik sosial di Kota Metro. Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase penanganan konflik sosial dalam katagori berhasil yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% bdari target 100%.hal ini karena :

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda bersama stakeholder terkait dalam membahas permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi
2. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda.
3. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Penurunan kinerja disebabkan karena :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia sudah sangat efesien karena SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sudah mengacu pada aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Penggunaan SDM telah melalui SK Walikota dan SK Sekretaris Daerah dan telah disesuaikan jumlahnya.
- Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dari anggaran Rp. 75.284.400,- realisasi Rp. 72.937.050,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,1%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kebaerhasilan dari Indikator Persentase penanganan konflik sosial ini di capai melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dan Penanganan Konflik Sosial.

Pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	
1	Mewujudkan Stabilitas Politik serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Peningkatan Kerukunan Beragama	Rp. 37.491.400	Rp. 36.124.950
		Jumlah Peserta Sosialisasi yang Paham Terhadap Bahaya Narkoba	Rp. 94.566.200	Rp. 84.676.000
		Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 13.774.269.418	Rp. 13.770.007.968
		Persentase Ormas yang Melaksanakan Fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Rp. 1.698.526.900	Rp. 1.645.989.350

		Persentase Penanganan Konflik Sosial	Rp. 75.284.400	Rp. 72.937.050
2	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Rp.	Rp.
3	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 32.202.800	Rp. 28.249.920
4	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik, kelompok masyarakat ormas, LSM	Rp. 13.774.269.418	Rp. 13.770.007.968
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Rp. 19.072.100	Rp. 15.224.850
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Agama	Persentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Rp. 37.491.400	Rp. 36.124.950
7	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan meningkatnya kualitas dan fasilitasi penanganan konflik nasional	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Rp. 75.284.400	Rp. 72.937.050

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban unit kerja dan sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis dan periodic yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2024 pengukuran kinerja dilakukan terhadap sebelas indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dari sebelas indikator kinerja tersebut semuanya telah tercapai sesuai dengan target.

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2024					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Stabilitas Politik serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Peningkatan Kerukunan Beragama	90%	100%	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi yang Paham Terhadap Bahaya Narkoba	100 orang	100 orang	100%
		Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

		Persentase Ormas yang Melaksanakan Fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Sekolah yang diberikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Persentase peserta pendidikan politik bagi partai politik, kelompok masyarakat ormas, LSM	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%

	Kemasyarakatan	yang Aktif			
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Agama	Persentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan meningkatnya kualitas dan fasilitasi penanganan konflik nasional	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%

B. Langkah dimasa mendatang

Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada Tahun 2024 telah tercapai dengan baik, namun Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Metro harus terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembelajaran beberapa kali dan berulang-ulang ke daerah lain yang dapat dijadikan contoh bagi perbaikan kinerja.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana/peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Metro
3. Menganggarkan dana untuk pengadaan software sistem informasi.
4. Adanya tambahan SDM yang menguasai IT dan SDM yang benar-benar mendukung demi kelancaran tugas-tugas untuk setiap kegiatan yang berjalan

5. Perlu adanya pembelajaran (study banding) bagi FKUB ke daerah lain yang dapat dijadikan contoh bagi perbaikan kinerja.
6. Adanya deteksi secara dini oleh Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
7. Dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai wadah yang memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik dibidang keagamaan dan kegiatan pembauran bangsa.
8. Diperlukan ketahanan mental masyarakat terutama di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pendidkan wawasan kebangsaan dan Bela Negara.
9. Dibutuhkan kemampuan dan peranan masyarakat sebagai pertahanan garis belakang dengan di bentuk Tim Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan daerah
10. Organisasi-organisasi yang ada perlu dirangkul sehingga akan terjadi hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Organisasi Politik, Ormas dan LSM di Kota Metro.
11. Dilakukan penyuluhan Politik kepada masyarakat Metro dan ASN Kota Metro.
12. Di lakukannya monitoring , Evaluasi dan pelaporan masalah Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGDAN
POLITIK KOTA METRO,

ELMANANI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700315 199003 2 001
